



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

*DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI SULAWESI SELATAN*



ASN
BERAKHLAK

BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

@dbmbk.sulsel

Sipakatau

putr.sulselprov.go.id



DINAS
BMBK
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
SULAWESI SELATAN



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 1182/VIII/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, sebagaimana termuat dalam dokumen tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 13 Agustus 2025

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Ditandatangani Secara Elektronik

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 adalah dokumen rencana operasional tahunan urusan Bina Marga dan Bina Konstruksi yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan lanjutan dari dokumen perencanaan Rencana Kerja Pokok dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja disusun oleh Tim Penyusun Renja yang memuat substansi pokok rumusan tindak lanjut program/kegiatan tahun 2025.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ini diharapkan seluruh proses pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan menjadi lebih berkualitas sesuai dengan sasaran Pemerintah Daerah Tahun 2025, serta berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan secara berkesinambungan.

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI,



IL. ASTINA ABBAS, MT.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	7
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU	7
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD	29
2.3.2. Permasalahan dan Hambatan	30
2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	30
2.3.4 Tantangan dan Peluang	30
2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting.....	31
BAB III	71
TUJUAN DAN SASARAN	71
BAB IV	84
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	84
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI..	84
B. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN.....	91
C. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.....	93
BAB V	137
PENUTUP	137
LAMPIRAN	138

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan.....	9
Tabel 2. 2.1. Beban Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 pada Perubahan Renja (Kondisi ini disesuaikan dengan Ketersediaan Pagu Anggaran)	23
Tabel 2. 2.2. Beban Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Kondisi ini disesuaikan dengan Ketersediaan Pagu Anggaran)	23
Tabel 2.2.2. (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	26
Tabel 2.2.3. Target Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun 2025	29
Tabel 2.4. (T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan	34
Tabel 2.5.(T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan	52
Tabel 3.1. Keselarasan Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2025 dengan Prioritas Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025.....	74
Tabel 3.2.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan	80
Tabel 4.1. (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Sulawesi selatan.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan Renja, Renstra dan Dokumen Lainnya.....Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan amanat Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Perubahan Renja ini berpedoman pada Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029 serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Penyusunan perubahan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

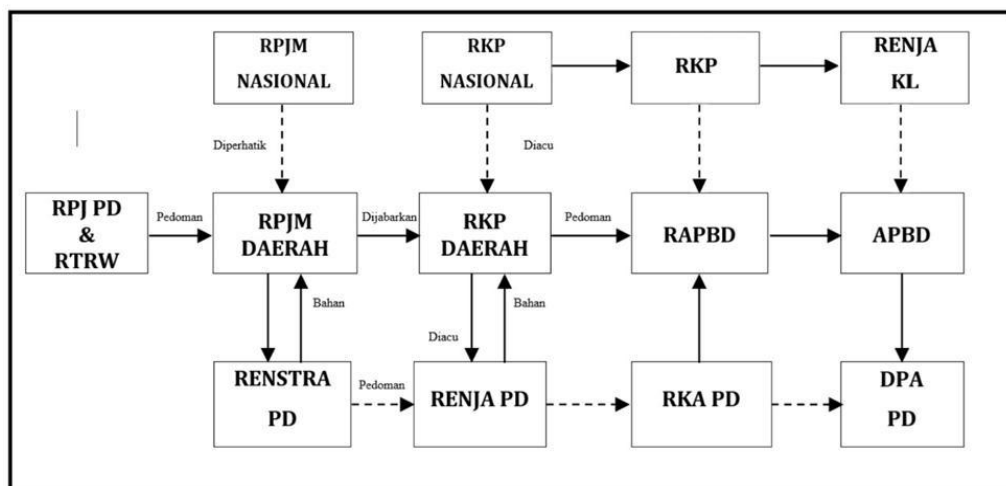
Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen perencanaan OPD untuk tahun 2025 memuat tujuan dan sasaran, fokus prioritas serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan yang ada atau mungkin timbul dengan mengedepankan pencapaian target Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang pada RPJMD 2025-2029 serta pengintegrasian sasaran dan arah kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta penajaman rencana program dan kegiatan bermuara pada penganggaran tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan merupakan langkah lanjutan untuk melaksanakan penyusunan

perencanaan pembangunan sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan tahapan:

- persiapan penyusunan;
- penyusunan rancangan awal;
- penyusunan rancangan
- pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah;
- perumusan rancangan akhir; dan
- penetapan.

Keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan RKPD, Rencana Strategis dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Keterkaitan Perubahan Renja, Renstra dan Dokumen Lainnya

1.2 .Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Pemilikan Jalan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor.01/SE/M/2023 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PKRMS (Provincial Kabupaten Road Management System) Dalam Kegiatan Preservasi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2025 ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan amanat perundang-undangan untuk menyediakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis 2025-2029 yang terdiri dari sasaran, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

b. Tujuan

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan Tahun 2025;
2. Sebagai bahan penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan RAPBD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 disusun mengikuti penyesuaian dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja), landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika yang menguraikan pokok bahasan penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun 2025.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

Memuat evaluasi capaian dari pelaksanaan perubahan rencana kerja Tahun 2024 serta perkiraan capaian Tahun 2025, analisis kinerja pelayanan, serta isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, serta implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra dan kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk pencapaian rencana pembangunan Tahun 2025.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional dan daerah, serta tujuan dan sasaran pelaksanaan Tahun 2025 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mencapai target capaian kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan Renja 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebesar **Rp.429.576.926.560,-** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp.907.870.000,-** Komponen belanja terdiri dari belanja operasi sebesar **Rp.74.248.291.216,-** yang mengalami penambahan sebesar **Rp.3.157.324.834,-** serta belanja modal sebesar **Rp.355.328.835.344,-** dari jumlah awal sebesar Rp.100.401.620.278,- hal ini disebabkan **adanya beban pembayaran hutang tahun sebelumnya** alur kas penganggaran Tahun 2024 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.
Alur Belanja Tahun 2024

Pokok	Rp.171.492.586.660, -	Nomor: 900/019/II/BAKD/ Tanggal 2 Januari 2024	-
Parsial I	Rp.243.509.861.377, -	Nomor: : 900/1628/III/BKAD/Tanggal 13 Maret 2024	Adanya beban pembayaran hutang tahun 2022 dan tahun 2023
Parsial II	Rp.440.695.279.332, -	Nomor :	
Perubahan	Rp. 429.576.926.560,-	Nomor : 900/114958/X/BKAD Tanggal 18 Oktober 2024	

Adapun Alokasi perubahan anggaran terdiri dari 2 komponen belanja yaitu belanja operasi sebesar **Rp. 74.248.291.216,-** (belanja pegawai **Rp.33.483.639.947,-** serta belanja barang dan jasa **Rp.40.764.651.269,-**) dan belanja modal (belanja modal peralatan dan mesin **Rp.297.240.000,-** belanja modal gedung dan bangunan **Rp. 77.810.593,-**, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi **Rp.354.953.584.751,-**).

Realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah dari target Tahun 2025 sebesar Rp.907.870.000,- sebesar Rp 4.573.736.091,06 atau 503,79% yang melampaui target sebesar Rp 3.665.866.091,46. Pagu anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun 2025 sebesar Rp.429.576.926.560,- terrealisasi sebesar Rp.416.404.378.700,- atau sebesar 96% dan terdapat sisa anggaran sebesar

Rp.13.172.547.860,-. Realisasi anggaran untuk komponen belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dari target sebesar Rp. 74.248.291.216,- terealisasi sebesar Rp.65.933.808.226,- atau 88,80% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.8.314.482.990,-. Komponen belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 355.328.635.344,- terrealisasi sebesar Rp. 346.470.570.474,- atau 97,51% terdapat sisa anggaran Rp.8.858.064.870,-

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dilaksanakan 3 program yaitu Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 10 kegiatan dan 43 sub kegiatan (sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024). Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 rekapitulasi kegiatan tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024

Nama Program	Capaian Kinerja (RENJA)		APBD (Rp.)	Realisasi Fisik & Keuangan (APBD)		
	% Target Program	% Realisasi Program		(Rp.)	% (Rp.)	% (Fisik)
Program Penyelenggaraan Jalan	71,42	71,42	375.827.011,592,-	363.803.261.012,-	96,80	100
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100	100	496.358.400,-	285.683.852,-	57,56	69,37
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	53.253.556.568,-	48.315.433.836,-	90,73	90,75
	91,69	97,79	429.576.926.560,-	412.404.378.700,-	96,00	99,43

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 11=(10/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi									
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	71,42%	71,42%						
		Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat	80%	27,21%						
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang penanganan ruas jalan	112,50 km	1465 km						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 11=(10/4)
		Presentase ketersediaan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan	100	100%						
1. 1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian	6 dokumen	6 dokumen						
1. 1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen pengelolaan leger jalan	1 dokumen	1 dokumen						
1. 1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen data dan informasi terkait kondisi jalan/jembatan	7 dokumen	7 dokumen						
1. 1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	25 km	14 km						
1. 1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	60 km	47,39 km						
1. 1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	50 km	64,87 km						
1.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan	938 km	759,24						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 11=(10/4)
1.03.10.1.01.0033		pemeliharaan secara rutin		km						
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	100 m	100 m						
1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	50 m	50,0 m						
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	1275 m	1339 m						
	Penanggulangan Bencana Tanggap Darurat	Persentase ketersediaan material tanggap darurat	100%	100%						
11.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan	31 dokumen	31 dokumen						
1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen teknis pengawasan penyelenggaraan jalan/jembatan	48 dokumen	36 dokumen						
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	100	100						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 11=(10/4)
1.03.11.1.01.0011	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di Wilayah Provinsi	300 orang	219 orang						
1.03.11.1.01.0013	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah dokumen SOP Penyelenggaraan pelatihan tenaga konstruksi kualifikasi jabatan ahli	1 dokumen	1,00						
1.03.11	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan ahli yang mengikuti pelatihan	200 orang	228,00						
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi SIPJAKI Cakupan Daerah Provinsi	Cakupan Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Provinsi yang Aktif dengan Data termutakhir	100	100,00						
1.03.11.1.02.0009	Penyelenggaraan pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan SIPJAKI	80 orang	100,00						
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Presentase Penyedia Jasa Konstruksi Berkinerja Baik	100%	100,00						
1.03.11.1.03.0003	Pengawasan dan Evaluasi Tertib	Jumlah laporan pengawasan dan	4 laporan	4,00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 11=(10/4)
	Usaha Tertib Penyelenggaraan dan tertib Pemanfaatan Jazsa Konstruksi pada APBD Provinsi	evaluasi tertib usaha tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada APBD Provinsi								
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP		7,00						
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%							
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100,00						
1.03.01.1.01	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100,00						
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen						
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	6,00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 11=(10/4)
1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1,00						
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1,00						
1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1,00						
1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	32 laporan	32,00						
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4,00						
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan	Presentase Penyusunan	100,00							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 11=(10/4)
	Perangkat Daerah	Laporan Keuangan tepat Waktu								
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	560 orang/bulan	254,00						
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 dokumen	1,00						
1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dokumen	1,00						
1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	1,00						
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	84 laporan	84,00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 11=(10/4)
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4 dokumen	0						
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan aset	100%	100,00						
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1	1,00						
1.03.01.1.03.0004	Pembinaan pengawasan dan Pengendalian Barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	16 laporan	16						
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	1						
1.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	1.691.725.000,-	3.110.754.237,00						
1.03.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah	1 dokumen	1						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 11=(10/4)
1.03.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	36 laporan	36						
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	90 point	90						
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1250 paket	310						
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen	1						
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	0						
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	100						
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	5						
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	13 paket	13						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 11=(10/4)
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	23 paket	23						
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100 paket	100						
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12						
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12						
1.03.01.1.06.0001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	0						
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100						
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	1 unit	0						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 11=(10/4)
		disediakan								
1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan	2 unit	0						
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	3						
1.03.0.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	100%	100						
1.03.0.1.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	108 laporan	108						
1.03.0.1.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	12						
1.03.0.1.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	96 laporan	96						
1.03.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 11=(10/4)
		dalam kondisi baik								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	114 unit	114						
1.03.001.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	31 unit	31						
1.03.001.1.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 gedung	1						

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai implikasi terbitnya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dimana OPD Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mengalami perubahan struktur organisasi dan Tata Kerja dari Dinas PUTR, berdasarkan peraturan Gubernur di atas Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sektor bina marga dan sektor bina konstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sektor bina marga dan sektor bina konstruksi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sektor bina marga dan sektor bina konstruksi;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut secara organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi terdiri dari Kesekretariatan, Bidang, dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), sebagai berikut :

a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

- b) **Bidang Bina Teknik dan Perencanaan** mempunyai tugas pokok menkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Bina Teknik.
- c) **Bidang Jalan** mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan jalan dan preservasi.
- d) **Bidang Jembatan** mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang jembatan.
- e) **Bidang Bina Konstruksi** mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang bina konstruksi
- f) **UPTD** mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bina Marga dan Bina Konstruksi berdasarkan wilayah kerjanya. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah terdiri dari 8 Unit Pelaksana Teknis antara lain:
 1. **UPTD Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Wilayah I (Palopo)**
 2. **UPTD Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Wilayah II (Enrekang)**
 3. **UPTD Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Wilayah III (Pare-pare)**
 4. **UPTD Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Wilayah IV (Makassar)**
 5. **UPTD Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Wilayah V (Bone)**
 6. **UPTD Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Wilayah VI (Bulukumba)**
 7. **UPTD Workshop dan Peralatan**
 8. **UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi**

Analisis kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dilakukan dengan membandingkan beban kerja perangkat daerah berdasarkan kewenangan dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beban kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang dibebankan kepada bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2.1. Beban Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 pada Perubahan Renja (Kondisi ini disesuaikan dengan Ketersediaan Pagu Anggaran)

No	Bidang	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	4,18 Km
2		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	85,06 Km
3	Jembatan	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	3 Jembatan
4		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan
5	Bina Teknik	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	64,73 Km
6	Jasa Konstruksi	Pelatihan Tenaga kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	100 Orang

Tabel 2. 2.2. Beban Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Kondisi ini disesuaikan dengan Ketersediaan Pagu Anggaran)

No	Unit Pelaksana Teknis Daerah	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Km)	Jumlah Jembatan yang Dipeliharakan Secara Rutin (Jembatan)	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Km)
----	------------------------------	---	--	--

No	Unit Pelaksana Teknis Daerah	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Km)	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Km)
1	UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan/Jembatan Wilayah I Palopo	44,83	73	0,5
2	UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan/Jembatan Wilayah II Enrekang	46,22	3	0,5
3	UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan/Jembatan Wilayah III Parepare	46,47	3	0,5
4	UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan/Jembatan Wilayah IV Makassar	87	3	0,5
5	UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan/Jembatan Wilayah V Bone	69,10	2	0,5
6	UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan/Jembatan Wilayah VI Bulukumba	45,88	8	0,5

Selain itu pelayanan yang diberikan berupa pengujian bahan konstruksi yang terdapat pada laboratorium pengujian bahan konstruksi yang melaksanakan pelayanan teknis operasional pengujian mutu bahan dan konstruksi, serta UPTD Workshop dan Peralatan yang melakukan pelayanan teknis operasional peralatan, perbengkelan, serta bahan jalan. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai unit pelayanan yang memberikan nilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari pelayanan pengujian laboratorium dan pengkajian konstruksi serta workshop dan peralatan serta memiliki target PAD untuk Tahun 2025 sesuai dengan Perubahan Renja sebesar **Rp.1.648.660.600,-**

Adapun beban kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi diharapkan pada kendala-kendala antara lain adanya kebutuhan/permintaan untuk penanganan yang lebih besar dibandingkan ketersediaan pagu anggaran, dan adapun rencana tindak lanjut perlu adanya penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran dan indikator kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Adapun indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat mempresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pada tahun 2025 terdapat 2 Sasaran IKU yang menjadi target antara lain (1) Meningkatnya kemantapan jalan provinsi (2) Terlaksananya Layanan Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi.

Penjabaran setiap indikator sebagai berikut : (1) **Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi** terdiri dari **1(satu) indikator kinerja yaitu Persentase panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap**. Indikator sasaran (2) yaitu **Terlaksananya Layanan Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi** dengan 1 indikator kinerja yaitu **Jumlah Layanan Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi**. Adapun tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan tersaji pada tabel di bawah ini (tabel T-C.30). Selain itu terdapat target capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk tahun 2025 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2. (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Bina Konsruksi

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Akhir Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2027	Akhir Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Rasio Kemantapan Jalan		Rasio Kemantapan Jalan	73,00%	75,09			75,38				Panjang jalan yang diintervensi dengan anggaran tidak mampu meningkatkan kemantapan jalan
	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap								75,38%	77%	77%	
	Persentase Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap					71,65	76,59					Indikator yang digunakan pada Renstra 2025-2030
	Presentase Penanganan Ruas Jalan Terisolir			77,00%	80			27,21%				Indikator sudah tidak digunakan lagi untuk tahun 2025
2	Presentase Pelaksanaan Layanan Jasa Konstruksi		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi	90%				90%				Indikator sudah tidak

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Akhir Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2027	Akhir Tahun 2026	
			yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat ahli									digunakan lagi untuk tahun 2025
	Terlaksananya layanan jasa konstruksi kewenangan Provinsi					13	13			13	13	Indikator yang digunakan pada Renstra 2025-2030
	Jumlah Layanan Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi					13	13					
	Persentase Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				100%	100%	100%		100%	100%	100%	

Keterangan NA= Not Available

Tabel 2.2.3. Target Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset perangkat daerah	1. Nilai Sakip	BB (76,1)	-	-
		2. % Temuan Material	0 %	-	-
2.	Meningkatnya akses dan kemantapan jalan provinsi	1. Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	75,38 %	-	-
3.	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	1. Persentase Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100 %	-	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Bina konstruksi

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dapat dilihat dari tingkat capaian indikator-indikator sasaran strategis yang tertera pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026. Berdasarkan kinerja yang telah disepakati untuk mendukung sasaran strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, seluruh indikator menunjukkan tingkat capaian 100%, walaupun terjadi penurunan kondisi di Tahun 2024, serta tidak optimalnya penanganan yang bersifat setempat setempat yang cenderung mudah rusak dan tidak bertahan lama, sehingga dibutuhkan penanganan yang bersifat menyeluruh di sepanjang ruas yang ditangani, penurunan kondisi mantap juga disebabkan adanya keterbatasan anggaran dan adanya bencana yang mengakibatkan kondisi jalan menurun.

Selain itu pencapaian kinerja OPD tidak lepas dari dukungan koordinasi yang baik dalam lingkup Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta dukungan dari stakeholder serta inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan diantaranya adanya aplikasi *E-Monitoring* (Emon Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi).

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi terutama dalam pencapaian target kinerja pelayanan yang dapat diidentifikasi berupa paket pekerjaan yang belum dibayarkan dan akan menjadi utang pada tahun 2025 di dalam DPA Perubahan.

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaannya, serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030. Berdasarkan dokumen tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan Bina Marga dan Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tujuan: “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah”.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Kondisi eksisting dan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal yang bersifat dinamis menyebabkan tantangan sekaligus peluang dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- b) Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan;
- c) Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ;
- d) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 677/III/Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi;
- e) Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:600.1.8/2130/DBMBK dan Nomor :06/III/DPRD/2025 Tanggal 7 Maret 2025 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak Penanganan Jalan dan Jembatan Provinsi.
- f) Panjang Ruas Jalan Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi berdasarkan SK Penetapan Ruas Jalan 2014,23 Km
- g) Terdapat 104 ruas yang tersebar di 6 UPT Wilayah Kab/Kota kecuali Kota Parepare.
- h) Panjang Ruas Jalan dengan kondisi mantap (baik+sedang) sepanjang 1.438,44 Km sedangkan Rusak Ringan (RR) sepanjang 219,95 Km dan Rusak Berat (RB) sepanjang 355,84 Km.

2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 yaitu:

1. Pengelolaan Lahan dan Lingkungan Hidup;
2. Risiko Bencana dan Perubahan Iklim;
3. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi;

4. Tata Kelola Pemerintahan;
5. Adaptasi Terhadap Dinamika Global dan Pembangunan Berkelanjutan;

Isu strategis untuk urusan pemerintahan Bina Marga dan Bina Konstruksi disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah Renstra, hasil telaahan Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara garis besar terdiri dari:

1. Akses dan kemandirian jalan

“Membuka akses dan membangun jalan untuk daerah-daerah yang terisolir di Sulawesi Selatan serta meningkatkan kemandirian jalan provinsi”

Permasalahan Indeks layanan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 digambarkan dengan nilai indeks layanan infrastruktur Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang mengalami penurunan menjadi 3,11 poin. Kondisi ini dipicu oleh kemandirian jalan daerah baik jalan provinsi maupun jalan Kabupaten/Kota yang masih di bawah kemandirian jalan nasional, hal ini menunjukkan belum tercapainya kondisi mantap jalan sesuai yang ditargetkan, sehingga memerlukan penanganan terhadap jalan yang rusak berat dan rusak ringan agar dapat berubah kondisinya menjadi baik maupun sedang dalam menunjang mobilitas masyarakat maupun barang antara daerah/wilayah.

Khusus untuk ruas jalan provinsi sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 677/III/Tahun 2023 adalah sepanjang **2.014,23 km** yang terdiri dari 104 ruas yang berada di 6 UPT Wilayah Kabupaten/Kota kecuali Kota Pare-pare. Progress kondisi jalan Provinsi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dengan kondisi mantap (kondisi baik + kondisi sedang) sepanjang 1438,54 km sedangkan rusak ringan sepanjang 160,55 km dan rusak berat sepanjang 415,14 km. Adapun jenis pengerasan ruas jalandapat diuraikan sebagai berikut Hotmix sepanjang 1.501,65 km, Makadam/Lapen sepanjang 4,57km, Perkerasan beton sepanjang 262,35 km, Telford/kerikil sepanjang 26,60 km, Tanah/Belum tembus sepanjang 219,06 km. Data tersebut mengindikasikan bahwa kondisi jalan Provinsi Sulawesi Selatan kinerjanya cukup bagus, dan diharapkan lebih maksimal dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat guna mendukung pergerakan ekonomi masyarakat.

Untuk menilai kekuatan interaksi antar wilayah ditinjau dari infrastruktur jalan sebagai prasarana transportasi, dapat ditentukan dengan pendekatan grafik yang membandingkan antara jumlah kota atau daerah dengan banyaknya jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut. Semakin banyak jalan yang menghubungkan antar wilayah semakin tinggi indeks konektivitasnya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap potensi pergerakan manusia, barang dan jasa karena infrastruktur jalan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah.

Kondisi jembatan kategori baik sebanyak 481 unit atau 57,2%, kondisi sedang sebanyak 258 unit (30,67%), rusak ringan sebanyak 28 unit (3,32%), dan rusak berat sebanyak 74 unit (8,79%).

Pada sektor pariwisata Sulawesi Selatan terdapat 2 faktor utama yang menjadi tantangan dalam mendorong sektor pariwisata Sulawesi Selatan diantaranya permasalahan infrastruktur terkait akses jalan, sarana dan prasarana pengembangan lokasi pariwisata dan pelaksanaan event kegiatan yang ada di Sulawesi Selatan.

2. Layanan Jasa konstruksi

Dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa konstruksi/konsultasi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 terhadap analisis kebutuhan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dapat dilihat pada tabel T.C.31, tabel tersebut memperlihatkan perbandingan pagu anggaran yang ada dalam dokumen perencanaan (Renstra) terhadap analisa kebutuhan tahun 2025.

Tabel 2.4. (T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelaksanaan layanan administrasi perangkat daerah	Sulawesi Selatan	100%	57.532.300.387,15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelaksanaan layanan administrasi perangkat daerah	Sulawesi Selatan	100%	65.232.280.284,39	
1.03.0 1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sulawesi Selatan	14 Dokumen	863.779.650,-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sulawesi Selatan	14	1.807.587.392,16	
1.03.0 1.1.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sulawesi Selatan	2 Dokumen	157.651.500,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sulawesi Selatan	2 Dokumen	385.000.000,-	
1.03.0 1.1.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	12.729.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sulawesi Selatan	9 Dokumen	308.000.000,-	

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.03.0 1.1.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	3.700.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	82.500.000,-	
1.03.0 1.1.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	5.789.200,-	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	55.000.000,-	
1.03.0 1.1.01 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	5.450.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	55.000.000,-	
1.03.0 1.1.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sulawesi Selatan	4 Laporan	212.336.900,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sulawesi Selatan	36 Laporan	346.500.000,-	
1.03.0 1.1.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sulawesi Selatan	4 Laporan	77.397.800,-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sulawesi Selatan	4 Laporan	575.587.392,16,-	

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.03.0 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Sulawesi Selatan	20 + 4 +4 Laporan	35.469.234.858,83	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Sulawesi Selatan	20 Laporan	32.120.092.892,23,-	
1.03.0 1.1.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sulawesi Selatan	243 Orang/bulan	34.029.720.884,15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sulawesi Selatan	265 Orang	31.779.092.892,23,-	
1.03.0 1.1.02 .0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	16.500.000,-	
1.03.0 1.1.02 .0004	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	0	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	11.000.000,-	
1.03.0 1.1.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sulawesi Selatan	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sulawesi Selatan	1 Laporan	11.000.000,-	

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.03.0 1.1.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Sulawesi Selatan	108 Laporan	418.926.650,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Sulawesi Selatan	108 Laporan	286.000.000,-	
1.03.0 1.1.02 .0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sulawesi Selatan	4 Dokumen	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sulawesi Selatan	4 Dokumen	16.500.000,-	
1.03.0 1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Sulawesi Selatan	3 Laporan	132.870.452,-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Sulawesi Selatan	3 Laporan	442.000.000,-	
1.03.0 1.1.03 .0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	1.488.950,-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	90.000.000,-	

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.03.0 1.1.03 .0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sulawesi Selatan	1 Laporan	27.500.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sulawesi Selatan	8 Laporan	308.000.000,-	
1.03.0 1.1.03 .0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sulawesi Selatan	1 Laporan	38.204.502,-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sulawesi Selatan	1 Laporan	44.000.000,-	
1.03.0 1.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pendapatan daerah (Rp)	Sulawesi Selatan	1.648.660.600,-	35.880.400,-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pendapatan daerah	Sulawesi Selatan	1.648.660.600,-	44.000.000,-	
1.03.0 1.1.04 .001	Perencanaan Pengelolaan retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	0	Perencanaan Pengelolaan retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	11.000.000,-	
1.03.0 1.1.04 .0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sulawesi Selatan	36 Laporan	21.880.400,-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sulawesi Selatan	36 laporan	33.000.000,-	

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.03.0 1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sulawesi Selatan	3 Laporan	84.013.900,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sulawesi Selatan	3 Laporan	715.000.000,-	
1.03.0 1.1.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sulawesi Selatan	1250 paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sulawesi Selatan	1250 Paket	605.000.000,-	
1.03.0 1.1.05 .0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sulawesi Selatan	0 Dokumen	10.648.000,-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	55.000.000,-	
1.03.0 1.1.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sulawesi Selatan	10 orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sulawesi Selatan	10 orang	55.000.000,-	
1.03.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	Sulawesi Selatan	226 Unit	12.681.196.810,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	Sulawesi Selatan	226 Unit	7.867.000.000,-	
1.03.0 1.1.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sulawesi Selatan	26 Paket	76.284.800,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sulawesi Selatan	28 Paket	121.000.000,-	

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.03.0 1.1.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sulawesi Selatan	50 Paket	116.742.000,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sulawesi Selatan	50 Paket	550.000.000,-	
1.03.0 1.1.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sulawesi Selatan	30 Paket	65.948.300,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sulawesi Selatan	70 Paket	93.500.000,-	
1.03.0 1.1.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sulawesi Selatan	20 Paket	9.464.000,-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sulawesi Selatan	100 Paket	110.000.000,-	
1.03.0 1.1.06 .0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sulawesi Selatan	3 Paket	10.140.604.400,-	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sulawesi Selatan	3 Paket	6.300.000.000,-	
1.03.0 1.1.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sulawesi Selatan	12 laporan	30.994.000,-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sulawesi Selatan	12 Laporan	60.000.000,-	
1.03.0 1.1.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sulawesi Selatan	12 Laporan	930.940.600,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sulawesi Selatan	12 Laporan	550.000.000,-	

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.03.0 1.1.06 .0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sulawesi Selatan	0 Dokumen	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	27.500.000,-	
1.03.0 1.1.06 .0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	55.000.000,-	
1.03.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Sulawesi Selatan	41 Unit	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Sulawesi Selatan	4 Unit	1.280.000.000,-	
1.03.0 1.1.07 .0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sulawesi Selatan	4 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sulawesi Selatan	4 Unit	1.280.000.000,-	
1.03.0 1.1.07 .0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sulawesi Selatan	2 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sulawesi Selatan	2 Unit	825.000.000,-	

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.03.0 1.1.07 .0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Sulawesi Selatan	2 Unit	0	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Sulawesi Selatan	1 Unit	2.750.000.000,-	
1.03.0 1.1.07 .0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang Disediakan	Sulawesi Selatan	0 paket	0	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang Disediakan	Sulawesi Selatan	30 Unit	412.500.000,-	
1.03.0 1.1.07 .0006	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sulawesi Selatan	6 Unit	0	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sulawesi Selatan	6 Unit	300.000.000,-	
1.03.0 1.1.07 .0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Sulawesi Selatan	0 Unit	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Sulawesi Selatan	1 Unit	110.000.000,-	
1.03.0 1.1.07 .0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sulawesi Selatan	0 Unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sulawesi Selatan	1 Unit	50.000.000,-	
1.03.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sulawesi Selatan	12 Laporan	9.024.286.670,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sulawesi Selatan	12 Laporan	13.726.350.000,-	

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.03.0 1.1.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sulawesi Selatan	108 Laporan	1.647.974.818,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sulawesi Selatan	108 Laporan	2.010.250.000,-	
1.03.0 1.1.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sulawesi Selatan	12 Laporan	105.458.500,-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sulawesi Selatan	12 Laporan	49.500.000,-	
1.03.0 1.1.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sulawesi Selatan	108 Laporan	6.674.214.708,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sulawesi Selatan	108 Laporan	11.666.600.000,-	
1.03.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Sulawesi Selatan	293 Unit	3.011.049.990,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Sulawesi Selatan	191 Unit	2.857.750.999,-	
1.03.0 1.1.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sulawesi Selatan	26 Unit	1.434.776.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sulawesi Selatan	26 Unit	690.000.000,-	

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.03.0 1.1.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sulawesi Selatan	9 Unit	30.780.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sulawesi Selatan	109	665.000.000,-	
1.03.0 1.1.09 .0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Sulawesi Selatan	34 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Sulawesi Selatan	34 Unit	842.750.000,-	
1.03.0 1.1.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sulawesi Selatan	16 Unit	1.287.146.840,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sulawesi Selatan	19 Unit	50.000.000,-	
1.03.0 1.1.09 .09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sulawesi Selatan	3 Unit	5.376.085,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sulawesi Selatan	3 Unit	610.000.000,-	
1.03.1 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)		77	609.924.057.892,-	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	Sulawesi Selatan	77	679.647.214.566,88	

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.03.1 0.1.01	PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	Panjang penanganan ruas jalan Provinsi	Sulawesi Selatan	24,42 Km	218.120.040.558,70,-	PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	Panjang penanganan ruas jalan Provinsi	Sulawesi Selatan	15,88 Km	679.647.214.566,88	
		Jumlah Penanganan Jembatan Pada Ruas Jalan Provinsi	Sulawesi Selatan	12 Lokasi			Jumlah Penanganan Jembatan Pada Ruas Jalan Provinsi	Sulawesi Selatan	12 Lokasi		
		Persentase Ketersediaan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Sulawesi Selatan	100%			Persentase Ketersediaan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Sulawesi Selatan	100%		
1.03.1 0.1.01 .0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya diawasi	Sulawesi Selatan	49,50 km	4.568.987.336,-	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya diawasi	Sulawesi Selatan	1547,11	18.900.000.000,-	
1.03.1 0.1.01 .0025	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Sulawesi Selatan	1 Jembatan	1.570.302.000,-	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Sulawesi Selatan	2 Jembatan	2.050.000.000,-	
1.03.1 0.1.01 .0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Sulawesi Selatan	92 Jembatan	2.702.024.714,-	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Sulawesi Selatan	495 Jembatan	5.100.000.000,-	
1.03.1 0.1.01 .0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang dipantau dan dievaluasi Penyelenggaraannya	Sulawesi Selatan	18,69 Km	393.496.500,-	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang dipantau dan dievaluasi Penyelenggaraannya	Sulawesi Selatan	1547,11	500.000.000,-	

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.03.1 0.1.01 .0029	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	Sulawesi Selatan	10 Jembatan	0	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	Sulawesi Selatan	10 Jembatan	10.000.000.000,-	
1.03.1 0.1.01 .0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Sulawesi Selatan	39,85 Km	2.812.043.606,-	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	Sulawesi Selatan	50 Km	100.000.000.000,-	
1.03.1 0.1.01 .0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Sulawesi Selatan	85,06 Km	406.632.143.838,-	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Sulawesi Selatan	40 Km	205.877.214.566,88	
1.03.1 0.1.01 .0032	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Sulawesi Selatan	3 Jembatan	33.029.884.465,-	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Sulawesi Selatan	3 Jembatan	10.000.000.000,-	
1.03.1 0.1.01 .0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	Sulawesi Selatan	340 Km	18.854.843.950,-	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	Sulawesi Selatan	1927,18 Km	43.200.000.000,-	
1.03.1 0.1.01 .0036	Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan yang Diganti	Sulawesi Selatan	0 Km	0	Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan yang Diganti	Sulawesi Selatan	1 Jembatan	10.000.000.000,-	

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.03.1 0.1.01 .0040	Pelebaran Jalan menuju Standar	Panjang Jalan yang dilebarkan Menuju Standar	Sulawesi Selatan	7 Km	42.250.000.000,-	Pelebaran Jalan menuju Standar	Panjang Jalan yang dilebarkan Menuju Standar	Sulawesi Selatan	16 Km	80.000.000.000,-	
1.03.1 0.1.01 .0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Sulawesi Selatan	13 Dokumen	6.889.874.400,-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Sulawesi Selatan	8 Dokumen	1.700.000.000,-	
1.03.1 0.1.01 .0042	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Sulawesi Selatan	4,18 Km	45.115.900.800,-	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Sulawesi Selatan	40 Km	189.300.000.000,-	
1.03.1 0.1.01 .0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Sulawesi Selatan	67,73 Km	577.637.350,-	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Sulawesi Selatan	3.474,29	2.520.000.000,-	
1.03.1 0.1.01 .0044	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	0	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	500.000.000,-	
1.03.1 1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		92	495.825.100,-	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Sulawesi Selatan	92	1.756.631.894,55	

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.03.1 1.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Provinsi	Sulawesi Selatan	3 Kali	539.124.650,-	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Provinsi	Sulawesi Selatan	3 Kali	1.006.631.894,55	
1.03.1 1.1.01 .0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Sulawesi Selatan	100 Orang	413.743.100,-	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Sulawesi Selatan	200 Orang	412.189.618,-	
1.03.1 1.1.01 .0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	0,-	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	294.442.275,72	
1.03.1 1.1.01 .0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang	0	0	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang	150	300.000.000,-	
1.03.1 1.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Sulawesi Selatan	2 Kali	15.995.000,-	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Sulawesi Selatan	2 Kali	300.000.000,-	

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.03.1 1.1.02 .0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan	0	0	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan	1	100.000.000,-	
1.03.1 1.1.02 .0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sulawesi Selatan	50 Orang	7.400.000,-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sulawesi Selatan	50 Orang	200.000.000,-	
1.03.1 1.1.03	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyedia jasa konstruksi berkinerja baik	Sulawesi Selatan	1 Laporan	145.034.000,-	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyedia jasa konstruksi berkinerja baik	Sulawesi Selatan	1 Laporan	450.000.000,-	
1.03.1 1.1.03 .0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Sulawesi Selatan	40 Paket Pekerjaan	51.092.450,-	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Sulawesi Selatan	40 Paket Pekerjaan	414.073.200,-	
1.03.1 1.1.03 .0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Sulawesi Selatan	42 Bangunan Konstruksi	13.274.550,-	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Sulawesi Selatan	40 Bangunan Konstruksi	19.450.000,-	

No.	RANCANGAN AWAL Perubahan RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.03.1 1.1.03 .0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi tertib Usaha	Sulawesi Selatan	25 Badan Usaha	10.315.000,-	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi tertib Usaha	Sulawesi Selatan	25 Badan Usaha	16.476.800,-	
TOTAL PAGU					667.952.183.379,15-	746.636.126.745,82					

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan prinsip Tata kelola Pemerintahan yang baik atau **Good Governance** dan dengan memperhatikan hasil pelaksanaan **MUSRENBANG** mulai dari tingkat desa yang ditindaklanjuti sampai dengan tingkat Kabupaten dan selanjutnya dibahas di tingkat Provinsi serta memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis, efisiensi dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan, dengan demikian diharapkan rencana Kerja tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sektor Bina Marga dan Bina Konstruksi sepanjang anggaran tersedia dan mampu mengakomodir program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan Rencana Kerja dibahas dalam Rakorteg lintas daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Rencana Kerja (Renja) dengan usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan pokok pokok pikiran dari wakil rakyat yang sesuai dengan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sektor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dan terdapat dalam program kegiatan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diselaraskan dengan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, adapun usulan tersebut tersaji dalam tabel **TC.32**

Tabel 2.5.(T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
USULAN RUAS PENANGANAN JALAN					
1	Penyelenggaraan Jalan/Rekosntruksi Jalan	Penanganan Preservasi Jalan paket 1	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	300,24 Km	Tahapan Pelaksanaan Konsultan MK dan Tahapan pelaksanaan
2	Penyelenggaraan Jalan/Rekonstruksi Jalan	Penanganan Preservasi Jalan Paket 2		209,38 Km	Tahapan Pelaksanaan Konsultan MK dan Tahapan pelaksanaan
3	Penyelenggaraan Jalan/ Rekonstruksi Jalan	Penanganan Preservasi Jalan Paket 3		254,85 Km	Tahapan Pelaksanaan Konsultan MK dan Tahapan pelaksanaan
4	Penyelenggaraan Jalan/ Rekonstruksi Jalan	Penanganan Preservasi Jalan Paket 4		286,8 KM	Tahapan Pelaksanaan Konsultan MK dan Tahapan pelaksanaan
5	Penyelenggaraan Jalan/rekonstruksi Jalan	Penanganan Preservasi Jalan Paket 5		218,75 Km	Tahapan Pelaksanaan Konsultan MK dan Tahapan pelaksanaan
6	Penyelenggaraan Jalan/Rekonstruksi Jalan	Penanganan Preservasi Jalan Paket 6		157,49 Km	Tahapan Pelaksanaan Konsultan MK dan Tahapan pelaksanaan
7	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Bts .Kab. Soppeng-Pompanua (Kab. Bone)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	6.00 Km	Kondisi pekerjaan telah terlaksana sebagian, Kondisi Rusak Berat.
8	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Ujung Lamuru-Pallatae (Kab. Bone)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	11.00 Km	Penanganan Lanjutan , kondisi material terhampar, berdebu dan rusak berat

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					menjadi keluhan masyarakat
9	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Pallatae-Bojo (Kab.Bone)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	7.00 Km	Penanganan Lanjutan
10	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Tanabatue-Sanrego-Pallatae (Kab. Bone)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	3.00 Km	Penanganan lanjutan , kondisi pekerjaan telah terlaksana sebagian, kondisi rusak berat.
11	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Bts. Kab. Bone-Salaonro (Kab. Soppeng)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	4.00 Km	Penanganan Lanjutan
12	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Bts. Kab. Soppeng-Sidrap (Kab. Sidrap)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	4.00 Km	Kondisi material terhampar, berdebu, dan Rusak Berat, menjadi keluhan masyarakat
13	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Bts. Kab. Enrekang-Anabanua-Dongi-Tanrutedong (Kab. Sidrap)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	3.00 Km	Penanganan Lanjutan Kondisi material terhampar, berdebu, dan rusak berat, menjadi keluhan masyarakat
14	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Botolempangan-Batubelerang-Bts.Kab.Bulukumba (Kab.Sinjai)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	2.00 Km	Penanganan Lanjutan, Pekerjaan terlaksana sebagian, terdampak bencana
15	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Passobo-Matangli-Massapu (Kab.TanaToraja)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	4.00 Km	Penanganan Lanjutan Kondisi pekerjaan telah terlaksana sebagian, kondisi

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					jalan tanah, menjadi keluhan masyarakat
16	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Rantepao- Sa'dan-Bts.Kab.Luwu (Kab. Toraja Utara)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	1.90 Km	Penanganan Lanjutan Kondisi Rusak Berat
17	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Rekonstruksi Jl. Lanjutan Rantepao- Pangalla-Baruppu-Bts Prov. Sulbar (Kab. Toraja Utara)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	3.00 Km	Penanganan tidak selesai karena adanya refocusing
18	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Sabbang- Tallang Penanganan Pasca Bencana (Kab. Luwu Utara)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	2 Titik	Penanganan Pasca Bencana
19	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Bts.Kab.Toraja Utara- Pantilang- Bua(Kab.Luwu)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	2.00 Km	Pekerjaan Tidak Selesai (Putus Kontrak Tahun 2023)
20	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Solo-Peneki- Kulampu (Kab. Wajo)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	10.00 Km	Ket: Rusak Berat
21	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Impa impa- Anabanua (Kab.Wajo)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	5.00 Km	Ket: Rusak Berat
22	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Bts.Kab.Soppeng- Ulugalung (Kab. Wajo)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	2.00 Km	Ket: Rusak Berat
23	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Impa Impa- Anabanua (Kab. Wajo)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	5.00 Km	Ket: Rusak Berat

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
24	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Batas Kab. Wajo- Salaonro (Kab. Soppeng)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	5.00 Km	Ket: Rusak Berat
25	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Takkalala- Cabbenge-Salaonro (Kab. Soppeng)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	6.00 Km	Ket: Rusak Berat
26	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Bts Barru- Takalala (Kab. Soppeng)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	9 .00 Km	Usulan akan d disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran
27	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Aroepala (Kota Makassar)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	1.80 Km	Ket: Rusak Berat
28	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan HM Yasin Limpo (Kab. Gowa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	2.50 Km	Ket: Rusak Berat
29	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Burung Burung-Bili bili (Kab. Gowa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	3.00 Km	Ket: Rusak Berat
30	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Mustafa Dg. Bunga (Kab. Gowa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	2.00 Km	Ket: Rusak Berat
31	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Tun Abdul Rasak (Kab. Gowa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	0.50 Km	Ket: Badan jalan tergenang air
32	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Sungguminasa-Malino (Kab. Gowa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	3.00Km	Ket:Rusak Berat
33	Penyelenggaraan Jalan	Penanganan Pasca Bencana Ruas Sungguminasa-Malino (Kab. Gowa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	4 Titik	Ket:Penanganan Pasca Bencana Alam

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
34	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Tanakaraeng-Sapaya- Bts Kab. Jeneponto (Kab. Gowa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	5.00 km	Ket:Rusak Berat
35	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Provinsi Sapaya-Malino (Kab. Gowa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	5.00 Km	Ket:Rusak Berat
36	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Bts Kab.Gowa-Tondong (Kab. Sinjai)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	4.00 Km	Ket: Rusak Berat
37	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan Ussu-Nuha -Bts.Prov.Sulteng (Kab.Luwu Timur)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	4.00 Km	Ket:Jalan Tanah (Daerah Terisolir)
38	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan Kawasan Center Point Of Indonesia	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	1 Paket	Ket:Aset Pemprov
39	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan/ penanganan Jalan Lingkar UNHAS	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	1 Paket	Ket:Hibah barang ke Pemerintah Pusat
USULAN PENANGANAN JEMBATAN					
1	Jembatan S. Marandang cs	Kab. Tana Toraja	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	1.8+15.8 m	Jembatan belum berfungsi disebabkan belum tuntas pengerjaannya
2	Penanganan Oprit Jembatan Walemping Cs	Kab. Soppeng	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	138.00 m	Pekerjaan oprit yang belum tuntas sehingga masih sulit dilalui kendaraan
3	Jembatan S. Malake	Kab. Sidrap	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	60.00 m	Pekerjaan yang belum tuntas

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
4	Jembatan S. Balampangi	Kab. Sinjai	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	15.80 m	Pekerjaan yang belum tuntas
5	Pembangunan Jembatan Ruas Palampang-Munte	Kab. Sinjai	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	12.00 m	Struktur balok jembatan patah, sehingga rawan runtuh/ambruk
6	Penanganan Oprit Jembatan Palattae Cs	Kab. Bone	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	360 m	Pekerjaan oprit yang belum tuntas sehingga masih sulit dilalui kendaraan
USULAN PENANGANAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN					
1	Penyelenggaraan Jalan/ Pemeliharaan Jalan/ Pemeliharaan Jembatan	Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu dan Kota Palopo (UPTD Wilayah I)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap/ Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	309,24 km/ 93 km/ 150 m	Mempertahankan kondisi kemantapan jalan
2	Penyelenggaraan Jalan/ Pemeliharaan Jalan/ Pemeliharaan Jembatan	Kab. Toraja Utara, Kab. Tana Toraja, Kab. Enrekang (UPTD Wilayah II)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap/ Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	312,86 km/ 104 km/ 150 m	Mempertahankan kondisi kemantapan jalan
3	Penyelenggaraan Jalan/ Pemeliharaan Jalan/ Pemeliharaan Jembatan	Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Barru (UPTD Wilayah III)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap/ Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	228,02 km/ 81,00 km/ 150 m	Mempertahankan kondisi kemantapan jalan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
4	Penyelenggaraan Jalan/ Pemeliharaan Jalan/ Pemeliharaan Jembatan	Kota Makassar, Kab. Pangkep, Kab. Maros, Kab. Gowa, Kab. Takalar (UPTD Wilayah IV)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap/ Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	400,73 km/ 154.00 km/ 150.00 m	Mempertahankan kondisi kemandapan jalan
5	Penyelenggaraan Jalan/Pemeliharaan Jalan/Pemeliharaan Jembatan	Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng(UPTD Wilayah V)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap/Panjang Jalan yang Dipelihara secara RutinJumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	481.76 km/188.00 km/150 .00 m	Mempertahankan kondisi kemandapan jalan
6	Penyelenggaraan Jalan/ Pemeliharaan Jalan/ Pemeliharaan Jembatan	Kab. Jeneponto, Kab. Sinjai, Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba, Kab. Kepulauan Selayar (UPTD Wilayah VI)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap/ Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	281.62 km/ 107.00 km/ 150.00 m	Mempertahankan kondisi kemandapan jalan
USULAN PENGADAAN ALAT BERAT					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah/ Pengadaan Alat Besar	Wilayah I Palopo, Wilayah II Enrekang, Wilayah IV Makassar	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah/ Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Pengadaan Excavator PC 200 Lokasi Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor di Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Gowa, Kab. Sinjai, Kab. Pangkep, Kab. Bulukumba, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah/ Pengadaan Alat Besar	Wilayah I Palopo, Wilayah II Enrekang, Wilayah IV Makassar	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah/ Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Pengadaan Backhole Loader lokasi penanganan darurat bencana tanah longsor di Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo Kab. Gowa, Kab. Sinjai, Kab. Pangkep, Kab. Bulukumba, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah/ Pengadaan Alat Besar	Wilayah I Palopo, Wilayah II Enrekang, Wilayah IV Makassar	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah/ Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Pengadaan Motor Grader lokasi penanganan darurat bencana tanah longsor di Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo Kab. Gowa, Kab. Sinjai, Kab. Pangkep, Kab. Bulukumba, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng
USULAN RAKORTEKBANG					
1	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jl. Atapange- Doping Kab. Wajo	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan dapat ditindaklanjuti dengan melengkapi Proposal dan Titik Kordinat lokasi serta menyesuaikan anggaran Perangkat Daerah
2	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jl Wele-Belawa (Termasuk dalam Rua Jl.Anabanua-Malake) Kab. Wajo	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan dapat ditindaklanjuti dengan melengkapi Proposal dan Titik Kordinat lokasi

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					serta menyesuaikan anggaran Perangkat Daerah
3	Penyelenggaraan Jalan	1.Ruas Jl. Kulampu- Takalalla 2. Ruas Jl. Tancung-Sempang di Kab. Wajo (Termasuk dalam ruas Jl. Impa- Impa-Anabanua)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan dapat ditindaklanjuti dengan melengkapi Proposal dan Titik Kordinat lokasi serta menyesuaikan anggaran Perangkat Daerah
4	Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jl.Passobo- Matangli-Masuppu (Kab.TanaToraja)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan dapat ditindaklanjuti serta menyesuaikan anggaran Perangkat Daerah
5	Penyelenggaraan Jalan	Lanjutan Pembangunan Jembatan S. Marandang CS (Kab. Tana Toraja)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan dapat ditindaklanjuti serta menyesuaikan anggaran Perangkat Daerah
6	Penyelenggaraan Jalan	Penanganan Ruas Jl.Mustafa Dg. Bunga (Kab. Gowa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan alokasi anggaran
7	Penyelenggaraan Jalan	Penanganan Ruas Jl. Pallangga Desa Mangempang Kec. Bungaya (Kab. Gowa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan teknis (DED)
8	Penyelenggaraan Jalan	Penanganan Ruas Jl. Sapaya-Malino (Kab. Gowa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan teknis (DED)

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
9	Penyelenggaraan Jalan	Penanganan Ruas Jl. Pallangga-Sapaya (Kab. Gowa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan teknis (DED)
10	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan jalan Ruas Boro-Loka (Kab. Bantaeng)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani melalui pemeliharaan rutin jalan
11	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Ruas Jl. Takkalasi Tompo- Kamiri(Kec. Balusu)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran dan dokumen perencanaan teknis (DED)
12	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan Jl. Provinsi ruas Pangkajene- Soppeng	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Penentuan ruas jalan yang akan ditangani d disesuaikan dengan ketersediaan dokumen perencanaan (DED)
13	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan jalan provinsi ruas Mario Baru-Bina Baru	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Penentuan ruas jalan yang akan ditangani d disesuaikan dengan ketersediaan dokumen perencanaan (DED)
14	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan jalan provinsi ruas Tanru Tedong-Dongi- Salokaraja	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Penentuan ruas jalan yang akan ditangani d disesuaikan dengan ketersediaan dokumen perencanaan (DED)

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
15	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan jalan provinsi ruas Bilokka- Wette'e	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Penentuan ruas jalan yang akan ditangani disesuaikan dengan ketersediaan dokumen perencanaan (DED)
16	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan jalan provinsi ruas Ujung Lamuru-Pallatae	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	44,22 km	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan (DED)
17	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan jalan provinsi ruas Pallatae- Bojo	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	23,43 Km	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan (DED)
18	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan jalan provinsi ruas Tanabatue-Sanrego- Pallatae	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	31,34 km	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan (DED)
19	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan jalan provinsi ruas Bakunge- Solo-Sampire	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	9,10 km	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan (DED)
20	Penyelenggaraan Jalan	Penanganan jalan provinsi ruas Barru- Lompoti-ang-Lawo	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	4 km	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					teknis (DED)
21	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jl.akses antara Kab. Enrekang dengan Kab. Tana Toraja (Kec. Baroko)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan agar melengkapi proposal yang mencantumkan lokasi ruas jalan, penanganan yang disesuaikan dengan dokumen perencanaan (DED) serta ketersediaan anggaran
22	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kapasitas Jalan Akses di Desa Pattondosalu dan Desa Salodua (Kec.Maiwa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan agar melengkapi proposal yang mencantumkan lokasi ruas jalan, penanganan yang disesuaikan dengan dokumen perencanaan (DED) serta ketersediaan anggaran
23	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan ruas jalan Takkalasi Tompo-Kamiri (Kec. Balusu)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran dan dokumen perencanaan teknis (DED)
24	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan jalan ruas Pangkajene-Soppeng	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan diakomodasi sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan teknis (DED)
25	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan jalan ruas Mario Baru-Bina Baru	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani dan akan disesuaikan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					dengan ketersediaan dokumen perencanaan (DED)
26	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan jalan ruas Tanru Tedong-Dongi-Salokaraja	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani dan akan disesuaikan dengan ketersediaan dokumen perencanaan (DED)
27	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan jalan ruas Bilokka-Wette'e	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani dan akan disesuaikan dengan ketersediaan dokumen perencanaan (DED)
28	Penyelenggaraan Jalan	Penanganan jalan provinsi ruas Takkalala-Cabbenge-Salaonro	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	2 km	Usulan akan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran
29	Penyelenggaraan Jalan	Penanganan jalan provinsi ruas Bts Barru-Takkalala	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	2 km	Usulan akan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran
30	Penyelenggaraan Jalan	Penanganan jalan provinsi ruas Salaonro-Batas Kab. Wajo	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	2 km	Usulan akan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan teknis (DED)
31	Penyelenggaraan Jalan	Penanganan jalan provinsi ruas Batas Bone-Takkalalla	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	1 km	Usulan akan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
32	Penyelenggaraan Jalan	Penanganan jalan provinsi ruas Lajoa-Citta-Tobenteng (batas Kab. Bone)		3 km	Usulan akan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran
33	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jembatan S. Walemping 3	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan ditangguhkan
34	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kapasitas jalan berupa rekonstruksi jalan provinsi ruas Solo-Kulampu	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan ditangani sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran
35	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kapasitas jalan berupa rekonstruksi jalan provinsi ruas Impa Impa - Anabanua	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan ditangani sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan (DED)
36	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kapasitas jalan berupa rekonstruksi jalan provinsi ruas Atapange-Doping	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan ditangani sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan (DED)
37	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi ruas Rekonstruksi Jl. Lanjutan Rantepao-Pangalla-Baruppu-Bts Prov. Sulbar (Kec. Kepala Pitu dan Segmen Pangalla-Baruppu)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan ditangani sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran
38	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi ruas Rekonstruksi Jl. Lanjutan Bts Kab. Luwu-Tedong Bonga (segmen Kec. Kesu-Kec. Bontoa	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan ditangani sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
39	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi ruas Rekonstruksi Jl. Lanjutan Rantepao- Sadan-Batusitanduk (Kec. Sadan-Batu Sitanduk)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan dilaksanakan tahun 2024 melalui DAK
40	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi ruas Rehabilitasi Jl. Lanjutan Bts Kab. Tana Toraja- Alang Alang -Rantepao (segmen AlangAlang- Rantepao)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan dilaksanakan tahun 2024 melalui DAK
41	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi ruas Massuppu- Bts Kab. Pinrang	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan teknis (DED) serta melengkapi volume yang ditangani
42	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi ruas Bts.Kab.Enrekang- Kaduaja-Mebali	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan teknis (DED) serta melengkapi volume yang ditangani (ditangguhkan untuk diprioritaskan pada kegiatan yang mendesak)

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
43	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan Jalan provinsi ruas Passobbo-Matangli-Masuppu	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan teknis (DED) serta melengkapi volume yang ditangani
44	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan kemantapan Jalan Provinsi ruas Tuppu-Pao-Pamulungan-Bts Kab. Tana Toraja	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan teknis
45	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi ruas Mario-Bina Baru-Malimpung	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan teknis
46	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan kapasitas jalan ruas Ussu-Nuha	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan alokasi anggaran dan direncanakan akan ditangani tahun 2025
47	Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi Jalan Pangkep (Male'leng) - Tondongkura-Bts Kab.Bone (km 5+100)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan dokumen perencanaan (DED)
48	Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Jl. ruas Palampang-Munte-Bontolempangan	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					teknis (DED)
49	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi ruas Tanakaraeng-Sapaya- Bts Kab. Jeneponto (Kab. Gowa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	8 km	Usulan akan ditangani sesuai dengan ketersediaan DED (diusulkan sebagai POKIR)
50	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan kemantapan jalan provinsi Mustafa Dg Bunga (Bundaran Samata-Patung Massa) Kab. Gowa	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran Cat: sepanjang 1,3 km berupa betonisasi
51	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan kemantapan jalan provinsi ruas Burung- Burung-Bili-Bili (Kab.Gowa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	usulan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Cat: sepanjang 3 Km berupa betonisasi
52	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan kemantapan jalan provinsi ruas Sungguminasa-Malino (perempatan Sungguminasa Takalar- Malino) Kab. Gowa	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai dengan ketersediaan DED Cat: telah dilakukan pembetonan sepanjang 4 km
53	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan kemantapan jalan provinsi Sapaya-Malino (kab. Gowa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai dengan ketersediaan DED (diusulkan juga sebagai Pokir) Cat: sepanjang 10 km berupa pengaspalan jalan
54	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan kemantapan jalan provinsi Malino-Bts Kab. Sinjai (Kab. Gowa)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai dengan ketersediaan DED Cat: telah dilakukan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					pengaspalan jalan sepanjang 10 km
55	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan drainase jl lingkungan pada ruas jl. Aroepala disesuaikan menjadi penanganan ruas jl kewenangan provinsi LHR Tinggi agar dapat ditangani	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan alokasi anggaran jika telah disesuaikan
56	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kapasitas jl Bts.Kab.Luwu-Latuppa	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan teknis (DED)
57	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kemantapan Jl. Ruas Tanabau-Ngapaloka-Pattumbukang (Kab. Kepulauan Selayar)	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan akan ditangani sesuai ketersediaan alokasi anggaran dan ketersediaan dokumen perencanaan teknis (DED). Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan volume dan lokasi yang akan ditangani
58	Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Jalan menuju standar ruas jalan Tarengge-Malili	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan diterima dalam RAKORTEK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025
59	Penyelenggaraan Jalan	Penanganan Drainase Jalan dalam Kota Makassar	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan diterima dalam RAKORTEK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025
60	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan Bypass Mamminasata	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan diterima dalam RAKORTEK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi>Nama paket	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
61	Penyelenggaraan Jalan	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan/Preservasi Jalan Ruas Palopo-Masamba	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	Usulan diterima dalam RAKORTEK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, Indonesia menyadari akan menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pembangunan, Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan dan berharap masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terbesar dunia dengan gambaran berupa pendapatan perkapita sekitar US\$ 23.000-30.300, peningkatan kontribusi PDB Industri manufaktur menjadi 28,0 % dan PDB kemaritiman sebesar 15,0%, meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80%, kemiskinan menuju 0% pada kisaran 0,5-0,8%. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dimulai dari pemerintah, pemerintah daerah dengan pembangunan daerahnya.

Berdasarkan karakteristik kewilayahan, daerah harus mengedepankan terwujudnya kesejahteraan masyarakat berkeadilan dengan mengutamakan 17 (tujuh belas) fokus pembangunan sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

1. Kesehatan Untuk Semua;
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata;
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif;

4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi,
5. Penerapan Ekonomi Hijau;
6. Transformasi Digital;
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9. Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif, dan Inovatif
10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial;
11. Stabilitas Ekonomi Daerah;
12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya gentar Kawasan;
13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif,;
15. Berketahanan Energi, Air dan Pangan;
16. Lingkungan Hidup Berkualitas;
17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Sebagai bentuk penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam pencapaian visi dan misi maka disusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun. Adapun Tema RKP Tahun 2025 “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”.

Penyusunan prioritas pembangunan nasional pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memiliki 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional yakni:

1. **Prioritas Nasional I (PN 1):** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. **Prioritas Nasional 2 (PN 2):** Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. **Prioritas Nasional 3 (PN 3):** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;

4. **Prioritas Nasional 4 (PN 4)** :perpres nomor Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. **Prioritas Nasional 5 (PN 5)** : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. **Prioritas Nasional 6 (PN 6)**: Membangun dari Desa dan Dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. **Prioritas Nasional 7 (PN 7)**: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. **Prioritas Nasional 8 (PN 8)**: Memperkuat penyelerasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk layanan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2025, mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Arah kebijakan prioritas pembangunan terkait dengan Infrastruktur pada RKP tahun 2025 antara lain:

1. Pembangunan Jalan Daerah dan Konektivitas;
2. Perluasan akses air minum
3. Perluasan akses sanitasi layak;
4. Penuntasan manfaat bendungan;
5. Transportasi umum dan perkotaan.

Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional untuk urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 3.1. Keselarasan Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2025 dengan Prioritas Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Selaras	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro-Maritim Industri di Sentra Produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Cakupan Layanan Infrastruktur Konektivitas regional dan Penguatan Konektivitas Regional	Program : Penyelenggaraan Jalan		
		Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan		
		Sub Kegiatan		
		1.Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi fan tekni Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	13 dokumen
		3. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	67,73 Km

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Selaras	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
		4. Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	4,18 Km
		5.Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Direkonstruksi	85,06 Km
		6.Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Direhabilitasi	0 Km
		7. Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan pada Wilayah UPT I-VI dipelihara	339,5 Km
		8.Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	3 unit
		9.Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Unit
		10. Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	92 Unit
		11. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	18,69 Km

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Selaras	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
		12. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	49,50 Km
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi		
		Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli		
		Sub Kegiatan : Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	100 Orang
		Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Selaras	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
		Sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang ditingkatkan kapasitasnya	50 orang
		Kegiatan: Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		
		Sub kegiatan : Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	40 Paket Pekerjaan
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	42 Bangunan Konstruksi

3.1.2. Telaahan Terhadap Rencana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi meliputi:

Tujuan dan Sasaran:

Tujuan **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah”** dengan sasaran 3 **“Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi dengan indikator kinerja Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap serta Terlaksananya Layanan Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi.**

Adapun Pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada tematik transformasi ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang diturunkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai berikut :

- a. **Kawasan Makassar** (Takalar, Gowa, Makassar, Maros dan Pangkajene Kepulauan) diarahkan sebagai pusat diarahkan sebagai pusat pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa, Perdagangan, dan Ekonomi kreatif serta Industri berbasis Iptekin.
- b. **Kawasan Bulukumba** (Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Kepulauan Selayar) diarahkan sebagai pusat pertumbuhan pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi biru di bagian Selatan.
- c. **Kawasan Watampone** (Bone, Soppeng, dan Wajo) diarahkan sebagai Lumbung Pangan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau.
- d. **Kawasan Palopo** (Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara dan Tana Toraja) diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan

Ekonomi Biru di Kawasan Teluk Bone, Pusat Pertumbuhan Industri Pengolahan SDA Mineral, serta pusat pariwisata Budaya.

- e. **Kawasan Parepare** (Barru, Parepare, Pinrang, Sidenreng Rappang, dan Enrekang) diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Biru di Kawasan Selat Makassar dan Lumbung Pangan Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Hijau mendukung IKN).

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Marga

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun 2025-2029. Adapun hasil perumusan tujuan, sasaran, rencana jangka menengah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun 2025-2029 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD/Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator sasaran	Target Tahun 2025	Keterangan
Tujuan 6:					
Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1. Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	71,65%	Bidang Bina Teknik, Bidang Jalan, UPT DBMBK
		2. Terlaksananya Layanan Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi	13 layanan	Bidang Bina Konstruksi

Indikator-indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3. dirumuskan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi berdasarkan asas otonomi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sektor bina marga dan bina konstruksi;
- b. Pelaksanaan Kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sektor bina marga dan sektor bina konstruksi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sektor bina marga dan bina konstruksi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Sinkronisasi antara program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan perangkat daerah lain dalam pencapaian sasaran.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta program prioritas yang tercantum dalam

RPJMD provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, Dinas Bina Marga dan Bina Kosruksi mengampu 3 program yaitu program penyelenggaraan jalan (program prioritas), Program Pengembangan Jasa Konstruksi serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Program Penunjang), serta terdiri dari 12 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Adapun total pagu Perubahan untuk Tahun 2025 adalah sebesar **Rp.667.952.183.379,15**, yang terdiri dari **program prioritas** sebesar Rp.609.924.057.892,-, **Program penunjang** sebesar Rp 57.532.300.387,15 dan **Program Pengembangan Jasa Konsruksi** sebesar Rp 495.892.100,-.

Selain itu untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2025-2029 maka tujuan yang hendak dicapai dalam urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sektor Bina Marga dan sektor Bina Konstruksi yaitu **“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur” dengan Sasaran Meningkatnya Kemantapan Jalan provinsi dan Terlaksananya Layanan Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi.**

Untuk mewujudkan komitmen Kepala daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur salah satunya dengan pembangunan Infrastruktur Jalan Secara Masif khususnya pada jalur dengan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Tinggi serta penunjang mobilisasi produksi pertanian untuk mendukung target swasembada pangan Pemerintah, sesuai Nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 06/III/DPRD/2025 tanggal 7 Maret 2025 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak Penanganan Jalan dan Jembatan Provinsi yang bersifat strategis melalui paket pekerjaan preservasi *Muti Years Contract (MYC)* tahun 2025-2027 dan penanganan paket pekerjaan *Single Years Contract (SYC)*.

Penanganan Paket pekerjaan *Multi Years Contract* dan *Single Years Contract* mendukung pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 yang diarahkan pada pembangunan Kawasan Makassar yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa, perdagangan, dan ekonomi kreatif serta industri berbasis Iptekin, pembangunan Kawasan Bulukumba yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan pariwisata

dan pusat pertumbuhan ekonomi biru di bagian Selatan, Kawasan Watampone diarahkan sebagai lumbung pangan dan pusat pertumbuhan Ekonomi Hijau, Kawasan Palopo diarahkan sebagai pusat pertumbuhan Ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone, pusat pertumbuhan industri Pengolahan SDA Mineral, serta pusat pariwisata Budaya, pembangunan, Kawasan Parepare diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi biru di kawasan Selat Makassar dan Lumbung Pangan Berbasis pertumbuhan Ekonomi Hijau mendukung IKN.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan pada tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun 2025-2029 yang mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 maka Dinas Bina Marga menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasarannya Tahun 2025 sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program penunjang pelaksanaan fungsi dinas yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekertariat serta Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai Indikator Kinerja yaitu Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah, Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah dan Persentase Temuan LHP Yang Selesai

Ditindaklanjuti adapun kegiatan dan komponen sub kegiatan antara lain:

1. Kegiatan (1.03.01.1.01) : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan (1.03.01.2.01.0001) : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan (1.03.01.2.01.0002) : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Sub Kegiatan (1.03.01.2.01.0003) : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Sub Kegiatan (1.03.01.2.01.0004) : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
 - e. Sub Kegiatan (1.03.01.2.01.0005) : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Sub Kegiatan (1.03.01.2.01.0006) : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. Sub Kegiatan (1.03.01.1.02.0007) : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan (1.03.01.2.02) : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yaitu Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan (1.03.01.2.02.0001) : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan (1.03.01.2.02.0007): Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Palopo, UPTD PPJJ Wilayah II Enrekang, UPTD PPJJ Wilayah III Pare-Pare, UPTD PPJJ Wilayah IV Makassar, UPTD PPJJ Wilayah V Bone, dan UPTD PPJJ Wilayah VI Bulukumba.
3. Kegiatan (1.03.01.1.03) : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yaitu Persentase pelaksanaan pengelolaan aset dan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan (1.03.01.2.03.0001) : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b. Sub Kegiatan (1.03.01.2.03.0004) : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - c. Sub Kegiatan (1.03.01.2.03.0006) : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Kegiatan (1.03.01.2.04) : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yaitu Jumlah pendapatan daerah dan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan (1.03.01.2.04.0007) : Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi dan UPTD Workshop dan Peralatan.
5. Kegiatan (1.03.01.2.05) : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yaitu Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN dan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan (1.03.01.2.05.0002) : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan indikator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan;
 - b. Sub Kegiatan (1.03.01.2.05.0003): Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - c. Sub Kegiatan (1.03.01.2.05.0009) : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator kinerja Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Sub Kegiatan (1.03.01.2.05.0010) : Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan.
6. Kegiatan (1.03.01.2.06) : Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yaitu Persentase pemenuhan administrasi umum dan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan (1.03.01.2.06.0001) : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor yang Disediakan pada UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Palopo, UPTD PPJJ Wilayah II Enrekang, UPTD PPJJ Wilayah III Pare-Pare, UPTD PPJJ Wilayah IV Makassar, UPTD PPJJ Wilayah V Bone, dan UPTD PPJJ Wilayah VI Bulukumba, UPTD Laboratorium Pengujian Bahan konstruksi dan UPTD Workshop dan Peralatan;

- b. Sub Kegiatan (1.03.01.2.06.0002) : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan;
- c. Sub Kegiatan 1.03.01.2.06.0003) : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Palopo, UPTD PPJJ Wilayah II Enrekang, UPTD PPJJ Wilayah III Pare-Pare, UPTD PPJJ Wilayah IV Makassar, UPTD PPJJ Wilayah V Bone, dan UPTD PPJJ Wilayah VI Bulukumba, UPTD Laboratorium Pengujian Bahan konstruksi dan UPTD Workshop dan Peralatan;
- d. Sub Kegiatan (1.03.01.2.06.0005) : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan;
- e. Sub Kegiatan (1.03.01.2.06.0007) : Penyediaan Bahan Material dengan indikator kinerja Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan pada UPTD Workshop dan Peralatan;
- f. Sub Kegiatan (1.03.01.2.06.0008) : Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- g. Sub Kegiatan (1.03.01.2.06.0009) : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

- h. Sub Kegiatan (1.03.01.2.06.0011) : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 7. Kegiatan (1.03.01.2.07) : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan 1.03.01.2.07.00002) : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan;
 - b. Sub Kegiatan (1.03.01.2.07.0003) : Pengadaan Alat Besar dengan indikator kinerja Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan;
 - c. Sub Kegiatan (1.03.01.2.07.0006) : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan;
 - d. Sub Kegiatan (1.03.01.2.07.0008) : Pengadaan Aset Tak Berwujud dengan indikator kinerja Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan;
 - e. Sub Kegiatan (1.03.01.2.07.0009) : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.
- 8. Kegiatan (1.03.01.2.08) : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan dan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan (1.03.01.2.08.0002) : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada UPTD Penyelenggaraan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Palopo, UPTD PPJJ Wilayah II Enrekang, UPTD PPJJ Wilayah III Pare-Pare, UPTD PPJJ Wilayah IV Makassar, UPTD PPJJ Wilayah V Bone, dan UPTD PPJJ Wilayah VI Bulukumba, UPTD Laboratorium Pengujian Bahan konstruksi dan UPTD Workshop dan Peralatan;

- b. Sub Kegiatan (1.03.01.2.08.0003) : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada ;
 - c. Sub Kegiatan (1.03.01.2.08.0004) : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Palopo, UPTD PPJJ Wilayah II Enrekang, UPTD PPJJ Wilayah III Pare-Pare, UPTD PPJJ Wilayah IV Makassar, UPTD PPJJ Wilayah V Bone, dan UPTD PPJJ Wilayah VI Bulukumba, UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi dan UPTD Workshop dan Peralatan.
9. Kegiatan (1.03.01.2.09) : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja yaitu Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik dan sub kegiatan :
- a. Sub Kegiatan (1.03.01.2.09.0001) : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya;

- b. Sub Kegiatan 1.03.01.2.09.0002) : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya;
- c. Sub Kegiatan (1.03.01.2.09.0006) : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi dan UPTD Workshop dan Peralatan ;
- d. Sub Kegiatan (1.03.01.2.09.0008) : Pemeliharaan Aset Tak berwujud dengan indikator kinerja Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara;
- e. Sub Kegiatan (1.03.01.2.09.0010) : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Program Penyelenggaraan Jalan mempunyai indikator kinerja adalah persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap dengan komponen Sub Kegiatan yaitu:

- 1. Kegiatan (1.03.10.1.01) : Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan indikator kinerja yaitu panjang penanganan ruas jalan provinsi, jumlah penanganan jembatan pada ruas jalan provinsi, persentase ketersediaan perencanaan teknis jalan dan jembatan dengan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan (1.03.10.1.01.0041) : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dengan indikator kinerja jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang

disusun dan jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun pada UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi;

- b. Sub Kegiatan (1.03.10.1.01.0043) : Survey Kondisi Jalan/Jembatan dengan indikator kinerja Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya dan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya pada UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Palopo, UPTD PPJJ Wilayah II Enrekang, UPTD PPJJ Wilayah III Pare-Pare, UPTD PPJJ Wilayah IV Makassar, UPTD PPJJ Wilayah V Bone, dan UPTD PPJJ Wilayah VI Bulukumba;
- c. Sub Kegiatan (1.03.10.1.01.0042) : Pembangunan Jalan dengan indikator kinerja panjang jalan yang dibangun;
- d. Sub Kegiatan (1.03.10.1.01.0031) : Rekonstruksi Jalan dengan indikator kinerja panjang jalan yang direkonstruksi;
- e. Sub Kegiatan (1.03.10.1.01.0033) : Pemeliharaan Rutin Jalan dengan indikator kinerja panjang jalan yang dipelihara secara rutin pada UPTD Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Palopo, UPTD PPJJ Wilayah II Enrekang, UPTD PPJJ Wilayah III Pare-Pare, UPTD PPJJ Wilayah IV Makassar, UPTD PPJJ Wilayah V Bone, dan UPTD PPJJ Wilayah VI Bulukumba;
- f. Sub Kegiatan (1.03.10.1.01.0032) : Pembangunan Jembatan dengan indikator kinerja jumlah jembatan yang dibangun;
- g. Sub Kegiatan (1.03.10.1.01.0030) : Rehabilitasi Jalan dengan indikator kinerja panjang jalan yang direhabilitasi;
- h. Sub Kegiatan (1.03.10.1.01.0028) : Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan dengan indikator kinerja panjang jalan kewenangan provinsi yang dipantau dan dievaluasi penyelenggaraannya;
- i. Sub Kegiatan (1.03.10.1.01.0024) : Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi dengan indikator

kinerja panjang jalan kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya diawasi;

- j. Sub Kegiatan (1.03.10.1.01.0036) : Penggantian Jembatan dengan indikator kinerja jumlah jembatan yang diganti;
- k. Sub Kegiatan (1.03.10.1.01.0040) : Pelebaran Jalan Menuju Standar dengan indikator kinerja panjang jalan yang dilebarkan menuju standar.

C. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan Indikator kinerjanya adalah Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu:

1. **Kegiatan (1.03.11.1.01): Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dengan indikator kinerja Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Provinsi** dengan sub kegiatan:
 - a. Sub Kegiatan (1.03.11.1.01.0011) : Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli dengan indikator kinerja Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih;
 - b. Sub Kegiatan (1.03.11.1.01.0014) : Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli dengan indikator kinerja Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi.
2. **Kegiatan (1.03.11.1.02) : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi** dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Penyelenggaraan pelatihan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi dan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan (1.03.11.1.02.0009) : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI dengan indikator kinerja Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya.
3. **Kegiatan (1.03.11.1.03) : Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi** dengan indikator kinerja yaitu Jumlah laporan penyedia jasa konstruksi berkinerja baik dan sub kegiatan :

- a) Sub Kegiatan (1.03.11.1.03.0004) : Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan;
- b) Sub Kegiatan (1.03.11.1.03.0005) : Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk;
- c) Sub Kegiatan (1.03.11.1.03.0007) : Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha.

4.1.2.Sumber Pendanaan

Secara umum, pendanaan kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi bersumber dari PKB, PAD, Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit). Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1:03:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	100	Nilai	57.532.300.387,15	APBD		100	Nilai	50.161.115.931,-
		Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	100	%		APBD		100	%	
		Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	Provinsi Sulawesi Selatan	100	%		APBD		100	%	
1.03.01.1.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	14	Dokumen	863.779.650,-	APBD		14	Dokumen	1.345.587.392,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.0 1.1.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	Dokumen	157.651.500,-	APBD		2	Dokumen	385.000.000,-
1.03.0 1.1.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokumen	12.729.000,-	APBD		1	Dokumen	110.000.000,-
1.03.0 1.1.01. 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokumen	3.700.000,-	APBD		1	Dokumen	82.500.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.0 1.1.01. 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokumen	5.789.200,-	APBD		1	Dokumen	55.000.000,-
1.03.0 1.1.01. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokumen	5.450.000,-	APBD		1	Dokumen	55.000.000,-
1.03.0 1.1.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	Laporan	212.336.900,-	APBD		4	Laporan	82.500.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.0 1.1.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	Laporan	77.397.800,-	APBD		4	Laporan	575.587.392,-
1.03.0 1.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	20	Laporan	35.469.234.858,83	APBD		20	Laporan	36.728.231.339,-
1.03.0 1.1.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	243	Orang/ Bulan	34.029.720.884,15	APBD		243	Orang/ Bulan	36.608.176.139,-
1.03.0 1.1.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	51.846.800,-	APBD		12	Laporan	120.055.200,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD pada UPT Workshop dan Peralatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	2.022.200	APBD		12	Laporan	0
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	9.100.000,-	APBD		12	Laporan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. I	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	51.858.300,-	APBD		12	Laporan	0
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. II	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	58.765.000,-	APBD		12	Laporan	0
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	54.275.000,-	APBD		12	Laporan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Kuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. III									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. IV	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	43.075.750,-	APBD		12	Laporan	0
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. V	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	47.833.450,-	APBD		12	Laporan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. VI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	52.321.700,-	APBD		12	Laporan	0
1.03.0 1.1.03	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	3	Laporan	132.870.452,-	APBD		3	Laporan	245.000.000,-
1.03.0 1.1.03. 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokumen	1.488.950,-	APBD		1	Dokumen	90.000.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.0 1.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	27.500.000,-	APBD		1	Laporan	110.000.000,-
1.03.0 1.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	38.204.502,-	APBD		1	Laporan	45.000.000,-
1.03.0 1.1.04	Kegiatan: Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pendapatan daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	1.648.660.600,-	Rp	35.880.400,-	APBD				25.040.000,-
1.03.0 1.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	11.040.000,-	APBD		1	Laporan	25.040.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada UPT Workshop dan Peralatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	1.770.400,-	APBD		1	Laporan	0
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	9.070.000,-	APBD		1	Laporan	0
1.03.0 1.1.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Laporan	84.013.900,-	APBD		1	Laporan	110.000.000,-
1.03.0 1.1.05. 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dokumen	10.648.000,-	APBD		1	Dokumen	55.000.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.0 1.1.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10	Orang	0	APBD		10	Orang	55.000.000,-
1.03.0 1.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	Provinsi Sulawesi Selatan	200	Unit	12.681.196.810,-	APBD		200	Unit	6.467.757.200,-
1.03.0 1.1.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	Paket	64.448.500,-	APBD		20	Paket	55.000.000,-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada UPT Workshop dan Peralatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Paket	2.024.100,-	APBD		1	Paket	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Paket	9.812.200,-	APBD		1	Paket	0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. I	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Paket	0	APBD		1		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. II	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Paket	0	APBD		1	Paket	0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. III	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Paket	0	APBD		1	Paket	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. IV	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Paket	0	APBD		1	Paket	0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. V	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Paket	0	APBD		1	Paket	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. VI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Paket	0	APBD		1	Paket	0
1.03.0 1.1.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50	Paket	116.742.000,-	APBD		50	Paket	550.000.000,-
1.03.0 1.1.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30	Paket	65.948.300,-	APBD		30	Paket	27.500.000,-
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada UPT Workshop dan Peralatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Paket	0	APBD		30	Paket	0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah	Semua Kab/Kota,	1	Paket	0	APBD		30	Paket	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Tangga yang Disediakan pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. I	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Paket	0	APBD		30	Paket	0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. II	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Paket	0	APBD		30	Paket	0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. III	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Paket	0	APBD		30	Paket	0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Pada UPT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1	Paket	0	APBD		30	Paket	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. IV	Semua Kelurahan								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. V	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Paket	0	APBD		30	Paket	0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. VI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Paket	0	APBD		30	Paket	0
1.03.0 1.1.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	Paket	9.464.000,-	APBD		100	Paket	110.000.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.0 1.1.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	30.994.000,-	APBD		12	Laporan	165.000.000,-
1.03.0 1.1.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	930.940.600,-	APBD		12	Laporan	550.000.000,-
1.03.0 1.1.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	9.024.286.670,-	APBD		12	Laporan	3.699.500.000,-
1.03.0 1.1.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	948.708.430,-	APBD		12	Bulan	900.000.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. I	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	85.477.970,-	APBD		12	Bulan	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. II	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	45.283.230,-	APBD		12	Bulan	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. III	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	90.261.600,-	APBD		12	Bulan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. IV	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	46.490.400,-	APBD		12	Bulan	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. V	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	85.937.736,-	APBD		12	Bulan	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. VI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	78.199.876,-	APBD		12	Bulan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada UPT Workshop dan Peralatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	92.304.888,-	APBD		12	Bulan	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	175.310.688,-	APBD		12	Bulan	0
1.03.0 1.1.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	105.458.500,-	APBD		12	Laporan	49.500.000,-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1	Laporan	0	APBD		12	Laporan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. I	Kelurahan								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. II	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	0	APBD		12	Laporan	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. III	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	0	APBD		12	Laporan	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. IV	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	0	APBD		12	Laporan	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Semua Kab/Kota, Semua	1	Laporan	0	APBD		12	Laporan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. V	Kecamatan, Semua Kelurahan								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. VI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	0	APBD		12	Laporan	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT Workshop dan Peralatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	0	APBD		12	Laporan	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	0	APBD		12	Laporan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.0 1.1.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	1.612.224.612,-	APBD		12	Laporan	2.750.000.000,-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. I	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12		909.472.056,-	APBD		12		0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. II	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12		618.619.332,-	APBD		12		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan Wil. III	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12		439.422.144,-	APBD		12		0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan Wil. IV	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12		704.160.984,-	APBD		12		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan Wil. V	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12		328.966.608,-	APBD		12		0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan Pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan Wil. VI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12		923.872.056,-	APBD		12		0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan Pada UPT Workshop	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12		398.515.932,-	APBD		12		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		dan Peralatan									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan Pada UPT Laboratorium Pengujian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12		738.960.984,-	APBD		12		0
1.03.0 1.1.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191	Unit	3.011.049.990,-	APBD		191	Unit	1.540.000.000,-
1.03.0 1.1.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26	Unit	1.434.776.000,-	APBD		26	Unit	690.000.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.0 1.1.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	Unit	0	APBD		4	Unit	0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pada UPT Workshop dan Peralatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	Unit	30.780.000,-	APBD		4	Unit	0
1.03.0 1.1.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Unit	134.095.290,-	APBD		34	unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pada UPT Workshop dan Peralatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	Unit	735.358.400,-	APBD		5	Unit	0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. I	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	Unit	296.514.500,-	APBD		18	unit	120.000.000,-
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. II	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	Unit	121.178.650,-	APBD		18	unit	120.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1.03.0 1.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	Unit	5.376.085,-	APBD		3	Unit	610.000.000,-	
1.03.1 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Penanganan Jalan Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26	%	609.924.057.892,-	APBD		89,48	%	446.281.938.523,88	
1.03.1 0.1.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang penanganan ruas jalan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1636,72	Km	218.120.040.558,0,-	APBD		1802,36	Km	446.281.938.523,-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.1 0.1.01. 0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13	Dokumen	6.889.874.400,-	APBD		5	Dokumen	1.000.000.000,-
1.03.1 0.1.01. 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64, 73	Km	273.196.800,-	APBD		1.56 7,2	Km	600.000.000,-
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. I	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5	Km	50.007.500,-	APBD		269, 07	Km	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. II	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5	Km	55.609.950,-	APBD		301,96	Km	0
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. III	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5	KM	49.054.000,-	APBD		211,10	KM	0
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil.IV	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5	KM	50.000.000,-	APBD		448,56	KM	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil.V	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5	KM	49.906.300,-	APBD		420,31	KM	0
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil.VI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5	KM	49.968.000,-	APBD		276,18	KM	0
1.03.1 0.1.01. 0042	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,18	Km	133.738.640.147,-	APBD		40	Km	189.300.000.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.1 0.1.01. 0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,06	Km	406.632.143.838,-	APBD		40	Km	205.877.214.566,88
1.03.1 0.1.01. 0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin pada pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. I	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,83	Km	2.458.523.900,-	APBD		269,07	Km	2.600.000.000,-
		Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin pada pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. II	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,22	Km	2.649.910.800,-	APBD		301,96	Km	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin pada pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. III	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46, 47	Km	2.649.350.800,-	APBD		211,10	Km	2.650.000.000,-
		Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin pada pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. IV	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87	Km	4.650.000.000,-	APBD		448.56	Km	4.650.000.000,-
		Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin pada pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. V	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69, 10	Km	3.849.999.450,-	APBD		420.31	Km	3.850.000.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin pada pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. VI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,88	Km	2.597.059.000,-	APBD		276,18	Km	22.602.356.357,-
1.03.1 0.1.01. 0032	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	Jembatan	33.029.884.465,-	APBD		3	JEMBATAN	10.000.000.000,-
1.03.1 0.1.01. 0025	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Jembatan	1.570.302.000,-	APBD		2	JEMBATAN	2.050.000.000,-
1.03.1 0.1.01. 0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73	Jembatan	102.367.450,-	APBD		73	JEMBATAN	102.367.600,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		dan Jembatan Wil. I	Kelurahan								
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. II	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	Jembatan	99.413.800,-	APBD		3	Jembatan	0
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. III	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	Jembatan	99.947.500,-	APBD		3	Jembatan	0
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. IV	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	Jembatan	99.999.850,-	APBD		3	Jembatan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. V	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	Jembatan	155.091.100,-	APBD		2	Jembatan	0
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wil. VI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8	Jembatan	299.384.600,-	APBD		8	Jembatan	0
1.03.1 0.1.01. 0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18, 69	Km	393.496.500,-	APBD		1567 ,2	Km	0

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan program dan kegiatan di masing-masing bidang dan UPTD dengan indikator kinerja dan capaian kinerja yang terukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana ini disusun dengan merujuk pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, merujuk pada masalah yang dihadapi, serta memperhatikan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja ini merupakan landasan dan pedoman bagi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, serta bagi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Tahun 2025.

Ketersediaan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan rangkaian proses perencanaan dan penganggaran yang menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan ditindak lanjuti dengan nota kesepakatan kebijakan, prioritas dan plafon anggaran untuk menjadi pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025. Renja ini belum menjadi dokumen penganggaran dan masih akan melewati beberapa rangkaian proses, sehingga perubahan-perubahan serta penyesuaian yang terjadi pada proses pembahasan selanjutnya masih dimungkinkan terjadi. Akan tetapi prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis(Renstra) 2025-2029, serta penajaman yang dilakukan pada proses penyusunan Renja ini tetap menjadi arah utama pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun 2025.

Makassar,

KEPALA DINAS

Ir. ASTINA ABBAS,MT

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c

NIP : 19661001 199203 2 017

LAMPIRAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.1 0.1.01. 0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,50	Km	4.568.987.336,-	APBD		1567,2	Km	1.000.000.000,-
1.03.1 1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	495.825.100,-	APBD		93	%	947.885.476,-
1.03.1 1.1.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	Kali	539.124.650,-	APBD		3	Kali	294.442.276.-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.1 1.1.01. 0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	Orang	413.743.100,-	APBD		200	Orang	294.442.276,-
1.03.1 1.1.02	Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan pelatihan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	Kali	15.995.000,-	APBD		2	Kali	200.000.000,-
1.03.1 1.1.02. 0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50	Orang	7.400.000,-	APBD		50	Orang	200.000.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.1 1.1.03	Kegiatan: Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah laporan penyedia jasa konstruksi berkinerja baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	145.034.000,-	APBD		1	Laporan	453.443.200,-
1.03.1 1.1.03. 0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40	Paket Pekerjaan	51.092.450,-	APBD		42	Paket Pekerjaan	414.073.200.-
1.03.1 1.1.03. 0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42	Bangunan Konstruksi	13.274.550,-	APBD		42	Bangunan Konstruksi	19.450.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.1 1.1.03. 0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25	Badan Usaha	10.315.000,-	APBD		25	Badan Usaha	19.920.000,-
TOTAL						667.952.183.379,15					501.555.939.930,60

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan program dan kegiatan di masing-masing bidang dan UPTD dengan indikator kinerja dan capaian kinerja yang terukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana ini disusun dengan merujuk pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, merujuk pada masalah yang dihadapi, serta memperhatikan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja ini merupakan landasan dan pedoman bagi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, serta bagi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Tahun 2025.

Ketersediaan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan rangkaian proses perencanaan dan penganggaran yang menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan ditindak lanjuti dengan nota kesepakatan kebijakan, prioritas dan plafon anggaran untuk menjadi pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025. Renja ini belum menjadi dokumen penganggaran dan masih akan melewati beberapa rangkaian proses, sehingga perubahan-perubahan serta penyesuaian yang terjadi pada proses pembahasan selanjutnya masih dimungkinkan terjadi. Akan tetapi prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis(Renstra) 2025-2029, serta penajaman yang dilakukan pada proses penyusunan Renja ini tetap menjadi arah utama pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun 2025.

Makassar,

KEPALA DINAS



Ir. ASTHA ABBAS, MT

Pangkat Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19661001 199203 2 017